





## MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

TETAPKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

### Tekan Potensi Silpa, Dukung Pembahasan APBD Perubahan Lebih Awal



**Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari memimpin sidang paripurna, kemarin.**

**YOGYA (KR)** - Lembaga DPRD Kota Yogyakarta sepakat untuk mendukung pembahasan rencana APBD Perubahan Tahun 2024 yang akan diajukan oleh tim eksekutif lebih awal. Perubahan rencana kerja dewan pada tahun anggaran 2024 juga sudah berhasil ditetapkan melalui sidang paripurna yang digelar Jumat (7/6) kemarin. Langkah itu sekaligus menjadi upaya untuk merealisasikan potensi silpa lebih pengunaan anggaran,

nantinya akan diuntungkan karena kegiatan sampai akhir tahun akan semakin terarah," ungkapnya di sela sidang paripurna.

Rencana perubahan anggaran biasanya mulai dibahas pada periode Agustus. Sedangkan tahun ini, tim eksekutif rencananya akan menyampaikan penyerahan laporan penyerapan anggaran semester pertama tahun 2024 pada 1 Juli mendatang. Setelah itu akan dilanjutkan skema pembahasan secara intensif mulai dari rencana kegiatan pemerintah daerah untuk perubahan hingga pembahasan rencana kegiatan anggaran bersama mitra komisi. Harapannya pada akhir Juli sudah ada kesepakatan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Pemkot Yogyakarta terkait RAPBD 2024.

Ketika sejak pertengahan tahun sudah ada kesepakatan terkait perubahan anggaran maka realisasi hingga akhir tahun akan lebih optimal. Pasalnya, baik eksekutif maupun legislatif memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan yang difasilitasi oleh anggaran negara. "Semua aspek administratif juga sudah siap. Mulai dari laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2023, kepastian silpa tahun lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga realisasi penyerapan anggaran di semester pertama tahun ini," imbuh Dhian.

Pembahasan RAPBD Perubahan 2024 yang lebih awal juga sama sekali tidak ada muatan politis. Hal ini justru karena secara nasional tahun ini merupakan tahun politik. Selain Pemilu 2024, akhir tahun ini juga akan digelar Pilkada untuk menentukan kepala daerah definitif. Oleh karena itu hampir setiap daerah berupaya melakukan pembahasan anggaran pe-



**Anggota DPRD Kota Yogyakarta khidmat mengikuti jalannya sidang paripurna.**

bisa terjadi akibat realisasi pendapatan yang lebih besar dari target. Meski begitu diharapkan besaran silpa tidak mencapai ratusan miliar rupiah seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pada APBD 2023 lalu, besaran silpa menembus Rp 278 miliar dan akan dibahas dalam perubahan anggaran tahun ini.

Sementara salah satu kegiatan baru yang akan ditambahkan melalui APBD Perubahan 2024 ialah rencana pembelian insinerator atau alat pembakar sampah ramah lingkungan. Dari rencana awal yang sudah dikomunikasikan oleh eksekutif, akan ada dua alat pembakar sampah dengan total kebutuhan hingga tujuh miliar rupiah. Alat tersebut rencananya akan ditempatkan di area TPA Piyungan yang dikelola Pemkot. "Atas usulan itu, kami di lembaga dewan akan mendukung untuk direalisasikan tahun ini. Sebagai bentuk tanggungjawab moral serta dukungan politik dari kami atas persoalan sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta," tandasnya.

(Dhi)-f



**Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono membacakan surat keputusan.**

rubahan lebih awal. Supaya jangan sampai saat gelaran Pilkada pada akhir tahun, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Dhian yang memimpin jalannya sidang paripurna kemarin menjabarkan, penetapan perubahan rencana kerja dewan menjadi langkah awal untuk dibahas bersama eksekutif. Secara internal, dengan ditetapkannya perubahan rencana kerja tersebut maka kalangan dewan sudah sepatutnya atas kegiatan yang dicoret maupun yang ditambah. "Ruh perubahan rencana kerja kali ini sebenarnya untuk memangkas beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan silpa. Harapan kami, tahun ini besaran silpa bisa ditekan semaksimal mungkin," jabarnya.

Salah satu kegiatan yang dipangkas ialah fasilitasi pimpinan dewan ke luar negeri. Sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan pimpinan dewan berhak atas perjalanan ke luar negeri untuk menghadiri undangan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan ketugasannya. Dhian menilai, seperti tahun-tahun lalu, fasilitasi itu disepakati untuk dilaksanakan supaya alokasi anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. "Kami memandang itu tidak terlalu signifikan sehingga perlu dihapus dan dialihkan. Kalau tidak dihapus dan tidak dilakukan, nanti bisa menimbulkan silpa. Padahal semangat kami di perubahan anggaran saat ini agar semaksimal mungkin menekan potensi silpa," urainya.

Semakin besar silpa yang terjadi, bisa menjadi salah satu indikator terhadap serapan anggaran yang tidak sesuai rencana. Meski demikian, silpa juga



**Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari menandatangani surat keputusan didampingi Wakil Ketua I HM Fursan, dan Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono.**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005